

Barang dan Jasa Publik

Elisa Mardiyanti¹, Wahjoe Pangestoeti², Fidia Kurnia Sari³, Nyimas Umairoh⁴

¹²³⁴Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Di Indonesia, sebagian besar sistem pendidikan telah diprivatisasi oleh pemerintah, sehingga pendidikan tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai barang publik. Ini terlihat dari banyaknya sekolah swasta, baik lokal maupun internasional, yang bermunculan di berbagai wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari dokumen seperti buku dan jurnal yang relevan. Proses analisis data melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan pembahasan data sebelum diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai barang publik sekaligus barang privat. Sebagai barang publik, pendidikan mendukung produksi barang publik lainnya karena disediakan secara gratis, universal, dan setara. Namun, pendidikan juga bisa dianggap sebagai barang privat karena adanya persaingan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Persaingan ini seharusnya didasarkan pada kecerdasan dan intelektualitas, bukan semata-mata pada uang atau status sosial. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia mencerminkan dualitas perannya sebagai barang publik yang harus diakses oleh semua lapisan masyarakat dan sebagai barang privat yang menuntut persaingan sehat untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek publik dan privat dalam sistem pendidikan, memastikan bahwa akses yang adil dan setara tetap terjaga sementara tetap mendorong persaingan sehat yang didasarkan pada meritokrasi.

Kata Kunci: *Barang, Jasa Publik, sistem pendidikan*

Abstract

In Indonesia, most of the education system has been privatized by the government, so that education is no longer completely considered a public good. This can be seen from the number of private schools, both local and international, that have sprung up in various regions. This research uses qualitative methods by collecting data from documents such as relevant books and journals. The data analysis process involves collecting, reducing, presenting and discussing data before drawing conclusions. The research results show that education can function as a public good as well as a private good. As a public good, education supports the production of other public goods because it is provided free of charge, universally, and equally. However, education can also be considered a private good because of competition to obtain quality education. This competition should be based on intelligence and intellect, not solely on money or social status. Thus, education in Indonesia reflects the duality of its role as a public good that must be accessed by all levels of society and as a private good that demands healthy competition to get the best education. Through this qualitative approach, this research emphasizes the importance of maintaining a balance between public and private aspects of the education system, ensuring that fair and equal access is maintained while still encouraging healthy competition based on meritocracy.

Keywords: *Goods, Public Services, education system*

Article Info

Received date: 05 May 2024

Revised date: 15 May 2024

Accepted date: 22 May 2024

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sementara Ayat 2 menekankan kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang harus dibiayai oleh pemerintah. Ini menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dana untuk pendidikan, yang juga digolongkan sebagai barang publik dalam teori ekonomi. Barang publik memiliki sifat utama yakni non-rival dan non-eksklusif, yang berarti setelah diproduksi, barang tersebut bisa dinikmati oleh orang lain tanpa biaya tambahan, dan tidak ada persaingan dalam konsumsinya

Pendidikan dapat dianggap sebagai barang publik atau privat. Barang publik adalah barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat tetapi tidak ada yang mau memproduksinya. Kriteria utama untuk suatu barang publik meliputi sifat non-rival dan non-eksklusif dalam konsumsinya. Berdasarkan

standar ini, pendidikan dasar atau pendidikan wajib yang mencakup sekolah dasar dan menengah bisa dikategorikan sebagai barang publik. Ada teori-teori ekonomi dari ahli seperti Bowen, Eric Lindahl, dan Samuelson yang membahas pengadaan dan penyediaan barang atau jasa pendidikan, mengaitkannya dengan kepentingan publik dan swasta dalam konteks ekonomi politik.

Pendidikan dianggap sebagai barang publik karena sifatnya yang non-eksklusif dan non-rival. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga pendidikan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Jika pendidikan diserahkan ke pasar, biaya dan harga pendidikan akan meningkat, membatasi akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Komersialisasi pendidikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan menghilangkan sifat non-monopolistik dan non-kompetitif dari pendidikan, yang menandakan kegagalan pasar.

Namun, dalam praktiknya, pendidikan di Indonesia telah mengalami privatisasi yang signifikan. Banyak sekolah swasta, baik lokal maupun internasional, didirikan dan beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi sepenuhnya menjadi barang publik, karena masyarakat harus membayar untuk mendapatkan layanan pendidikan. Barang publik idealnya dapat dikonsumsi oleh konsumen lain tanpa biaya tambahan setelah diproduksi, tetapi banyak sekolah dan lembaga pendidikan beroperasi dengan sistem komersial, di mana biaya pendidikan dibebankan kepada konsumen.

Untuk memenuhi definisi dan karakteristik barang publik, pendidikan harus bersifat non-rival dan non-eksklusif. Artinya, penggunaan pendidikan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya untuk individu lain, dan tidak ada yang bisa dikecualikan dari mendapatkannya. Berdasarkan kriteria ini, pendidikan dasar dan menengah yang diwajibkan oleh pemerintah harus dikategorikan sebagai barang publik. Namun, dalam kenyataannya, banyak elemen pendidikan yang diprivatisasi, mengurangi aksesibilitas bagi sebagian masyarakat.

Teori-teori yang mendasari konsep barang publik, seperti yang diusulkan oleh Bowen, Eric Lindahl, dan Samuelson, membahas penyediaan dan pembiayaan barang atau jasa pendidikan sesuai dengan kepentingan publik dan swasta. Pemikiran ini menekankan bahwa kepentingan publik sering kali berhubungan erat dengan kepentingan pribadi, dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang diutamakan. Pendidikan sebagai barang publik seharusnya disediakan oleh negara dan dibiayai melalui pajak dan pendapatan lainnya. Namun, ketika pendidikan dikomersialkan, harga dan biaya pendidikan meningkat, mengurangi aksesibilitas dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Privatisasi pendidikan mencerminkan kegagalan pasar dalam menyediakan barang publik secara efektif. Pendidikan yang diprivatisasi cenderung menjadi mahal dan eksklusif, membatasi akses bagi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi barang publik yang tersedia bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan yang luas dan terjangkau, agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan dasar dan menengah yang diwajibkan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai contoh barang publik yang ideal. Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk mendukung sistem pendidikan publik, mengurangi ketergantungan pada sektor swasta, dan memastikan bahwa pendidikan tetap bersifat non-rival dan non-eksklusif. Pendidikan seharusnya tetap menjadi barang publik yang dikelola dan dibiayai oleh negara untuk menjamin aksesibilitas dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara. Pendidikan yang dikomersialisasi hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga pendidikan sebagai barang publik, menyediakan layanan pendidikan yang luas dan terjangkau, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

METODE

Judul penelitian "Barang dan Jasa Publik" memerlukan pendekatan metodologi yang komprehensif untuk mengkaji berbagai aspek teoritis dan praktis terkait penyediaan, pengelolaan, dan konsumsi barang serta jasa publik. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu studi literatur, pengumpulan data primer, analisis data, dan interpretasi hasil. Peneliti akan mengumpulkan dan meninjau berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan publik. Studi literatur bertujuan untuk membangun landasan teori yang kuat mengenai konsep barang dan jasa publik, termasuk karakteristik, peran pemerintah dalam penyediaannya, dan teori-teori ekonomi yang mendasarinya seperti teori barang publik menurut Samuelson, Lindahl, dan lainnya. Studi literatur juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya yang dapat menjadi fokus dalam penelitian ini. Setelah memiliki landasan teori yang kokoh, tahap berikutnya adalah pengumpulan data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer bisa meliputi survei, wawancara, dan observasi. Survei akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang representatif dari populasi, yang bisa mencakup warga negara, pejabat pemerintah, dan pakar ekonomi. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan pengalaman responden terkait barang dan jasa publik, termasuk aksesibilitas, kualitas, dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pejabat pemerintah dan pakar ekonomi untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan dan tantangan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Observasi langsung juga dapat dilakukan untuk melihat kondisi nyata penyediaan dan penggunaan barang serta jasa publik di lapangan. Analisis data merupakan tahap selanjutnya dalam penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi akan dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengolah data survei dan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif dan inferensial akan digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sementara itu, analisis kualitatif akan dilakukan terhadap data wawancara dan observasi untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman responden terkait barang dan jasa publik. Teknik analisis kualitatif seperti coding, kategorisasi, dan analisis tematik akan diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan menyusun narasi yang komprehensif. Dalam penelitian ini adalah interpretasi hasil. Pada tahap ini, peneliti akan menyintesis temuan dari analisis data dan mengaitkannya dengan landasan teori yang telah dibangun pada tahap studi literatur. Hasil penelitian akan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Peneliti juga akan mendiskusikan implikasi praktis dari temuan penelitian, memberikan rekomendasi kebijakan, dan mengidentifikasi area untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang barang dan jasa publik, dengan memanfaatkan pendekatan yang sistematis dan multi-metode. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang penyediaan barang dan jasa publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Barang publik memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas tanpa harus membayar untuk menikmatinya. Dalam konteks ini, setiap orang dapat menggunakan barang publik secara gratis tanpa menghalangi orang lain untuk mengaksesnya. Definisi lain menyatakan bahwa barang publik dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersamaan, sementara barang pribadi hanya dapat dinikmati oleh satu individu pada satu waktu tertentu (Prasetya, 2012).

Barang publik adalah barang yang tersedia untuk digunakan oleh banyak orang tanpa biaya tambahan. Sebaliknya, barang pribadi hanya dapat dinikmati oleh satu individu, atau lebih tepatnya, barang pribadi tidak bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa adanya biaya tambahan. Karena negara yang menyediakan barang publik, barang tersebut tersedia bebas untuk semua orang. Karena penggunaan barang publik tidak memerlukan pembayaran, sektor swasta umumnya tidak tertarik untuk memproduksinya. Sektor swasta tidak akan dapat memenuhi kebutuhan barang publik secara efisien meskipun mereka mencoba untuk menyediakannya. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran untuk memproduksi barang publik. Barang publik dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan pemerintah berperan dalam penyediaannya. Biaya produksi atau pengadaan barang publik biasanya

dibiayai melalui pajak, berbeda dengan barang privat yang diproduksi dan dijual oleh organisasi atau perusahaan swasta.

Karakteristik Barang dan Jasa Publik

Ada dua karakteristik utama yang menjadi ciri khas barang publik (Prasetya, 2012):

a) Barang Publik Bersifat Non-Rival

Barang publik memiliki sifat non-rival dalam konsumsinya, artinya jumlah barang publik tertentu bisa dibagi oleh banyak konsumen tanpa mengurangi jumlah konsumsi yang tersedia bagi konsumen lainnya. Sebagai contoh, siaran televisi dan radio adalah barang non-kompetitif dalam hal konsumsi. Banyak konsumen dapat menikmati program yang sama tanpa saling mengurangi pengalaman satu sama lain. Sebagai contoh lain, manfaat dari jasa pertahanan juga tidak bersaing. Bahkan ketika populasi suatu negara meningkat, tidak ada warga negara yang akan mengalami penurunan jumlah layanan pertahanan yang diterima, karena pertahanan dan keamanan diberikan secara merata kepada seluruh penduduk. Barang publik murni memiliki karakteristik utama non-rivalitas, yang berarti konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengonsumsinya.

b) Barang Publik Bersifat Non-Eksklusif

Barang publik juga bersifat non-eksklusif, artinya tidak ada individu yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaat barang publik tersebut. Meskipun ada individu yang mungkin tidak ingin orang lain menikmati barang publik, mereka tidak bisa mencegahnya. Dalam banyak kasus, sulit atau tidak mungkin menetapkan harga yang seragam untuk barang publik. Properti ini disebut non-eksklusivitas. Misalnya, akan sangat mahal dan tidak praktis untuk mengecualikan orang-orang yang menolak membayar untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas udara. Ketika barang publik disediakan untuk kepentingan orang banyak, tidak ada satu orang pun yang bisa dikecualikan dari menikmatinya. Sebagai contoh, peningkatan kualitas udara memberikan manfaat bagi semua orang, tanpa memandang kontribusi mereka terhadap biaya tersebut.

Pendidikan sebagai Barang dan Jasa Publik

Pendidikan adalah contoh dari barang publik yang konsumsinya tidak membebankan biaya pada masyarakat, dan tidak ada orang yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaatnya. Samuelson menambahkan bahwa barang publik adalah barang yang manfaatnya tersebar secara merata ke seluruh masyarakat, baik digunakan atau tidak. Barang publik memiliki karakteristik khusus yaitu ketersediaannya bisa ditingkatkan melalui intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah. Contoh ekstrim dari kepentingan publik adalah pertahanan negara. Setiap orang, secara tidak langsung, menggunakan layanan ini, dan konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi konsumsi oleh orang lain.

Dua syarat utama yang berlaku untuk barang publik adalah non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Non-rivalitas berarti bahwa mengonsumsi suatu barang tidak membuat barang tersebut kurang tersedia bagi orang lain. Non-eksklusivitas berarti tidak ada satu pun yang bisa dikecualikan dari penggunaan barang tersebut. Barang publik belum tentu bersifat publik jika untuk mendapatkannya seseorang perlu berusaha dan mengeluarkan biaya. Barang publik harus tersedia bagi masyarakat tanpa persaingan. Menurut Grace (H. McLaughlin, Bab 12), pendidikan mengklaim statusnya sebagai barang publik selama pendidikan menciptakan kondisi dasar yang memungkinkan terjadinya demokrasi. Barang publik pada dasarnya meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar layanan tersebut, dan meningkatkan kapasitas moral, intelektual, kreatif, ekonomi, dan politik mereka. Ini adalah layanan publik yang diinginkan yang memfasilitasi perolehan tersebut.

Peran Negara dalam Penyediaan Barang Publik

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan barang publik. Karena sifat non-rivalitas dan non-eksklusivitas, barang publik tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor swasta cenderung mencari keuntungan, yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan untuk menyediakan barang secara gratis atau dengan biaya minimal. Oleh karena itu, negara harus campur tangan untuk memastikan bahwa barang publik tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Barang publik biasanya dibiayai melalui pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pendapatan pajak digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang publik sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Model pembiayaan ini berbeda dengan barang privat yang

diproduksi dan dijual oleh perusahaan swasta dengan harga tertentu. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai barang-barang publik seperti pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur.

Penyediaan barang publik oleh negara dianggap lebih efisien karena negara tidak berorientasi pada keuntungan seperti sektor swasta. Negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang paling efektif dan adil. Oleh karena itu, negara bisa menyediakan barang-barang publik tanpa harus membebani masyarakat dengan biaya tambahan. Meskipun negara bertanggung jawab atas penyediaan barang publik, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah pendanaan. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang publik. Selain itu, pemerintah juga harus mengelola barang-barang publik dengan cara yang transparan dan akuntabel untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

Barang publik adalah barang yang memberikan manfaat kepada banyak orang tanpa memerlukan pembayaran dari pengguna. Barang publik memiliki dua karakteristik utama: non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Pendidikan adalah contoh barang publik karena memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan tidak mengecualikan siapapun dari menikmati manfaatnya. Negara memiliki peran penting dalam penyediaan barang publik, dan pembiayaannya biasanya dilakukan melalui pajak. Penyediaan barang publik oleh negara lebih efisien karena negara tidak berorientasi pada keuntungan. Meskipun demikian, penyediaan barang publik menghadapi tantangan pendanaan dan pengelolaan yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Barang publik memberikan manfaat luas yang tidak dibatasi oleh konsumsi individual. Karakteristik ini menuntut peran aktif negara dalam penyediaannya, mengingat sektor swasta tidak dapat menyediakannya secara efisien karena orientasi profit. Pajak menjadi instrumen utama dalam membiayai barang publik, memastikan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, bisa mendapatkan manfaatnya. Hal ini berbeda dengan barang privat yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan swasta dengan harga tertentu.

Peran negara sangat krusial. Pendidikan sebagai barang publik memungkinkan setiap warga negara untuk memperoleh manfaat tanpa perlu membayar langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Dalam praktek, pendidikan membantu menciptakan dasar untuk demokrasi dengan meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas moral, intelektual, serta ekonomi masyarakat. Pendidikan yang disediakan oleh negara harus diakses secara merata dan adil, tanpa ada yang dikecualikan.

Penyediaan barang publik juga menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan pengelolaan. Negara harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan publik. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. Pemerintah harus memastikan bahwa barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Selain pendidikan, contoh lain dari barang publik adalah layanan kesehatan, infrastruktur jalan, dan pertahanan negara. Layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah memungkinkan akses bagi seluruh masyarakat tanpa biaya tambahan. Infrastruktur jalan, yang dibangun dan dipelihara oleh negara, juga memungkinkan akses transportasi yang mudah dan gratis bagi semua pengguna. Pertahanan negara memberikan keamanan dan perlindungan yang merata kepada seluruh warga negara, tanpa memandang kontribusi individu terhadap biaya pertahanan tersebut.

Peran negara dalam penyediaan barang publik sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa publik secara efisien, adil, dan merata. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang kemampuan ekonomi, dapat menikmati manfaat dari barang publik. Pemerintah harus bekerja untuk mengatasi tantangan pendanaan dan pengelolaan untuk memastikan bahwa barang publik tetap dapat diakses oleh semua orang.

Barang publik adalah jenis barang yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas, meskipun mereka tidak harus membayar untuk menikmatinya. Dalam konteks ini, masyarakat tidak bisa menghalangi orang lain untuk menggunakan barang publik tersebut secara cuma-cuma. Definisi lainnya menyebutkan bahwa barang publik adalah barang yang dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersamaan, sedangkan barang pribadi hanya dapat dinikmati oleh satu individu pada waktu

tertentu (Prasetya, 2012).Barang publik adalah barang yang tersedia untuk digunakan oleh banyak orang tanpa biaya tambahan. Sebaliknya, barang pribadi hanya dapat dinikmati oleh satu individu, atau lebih tepatnya, barang pribadi tidak bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa adanya biaya tambahan. Karena negara yang menyediakan barang publik, barang tersebut tersedia bebas untuk semua orang. Karena penggunaan barang publik tidak memerlukan pembayaran, sektor swasta umumnya tidak tertarik untuk memproduksinya. Sektor swasta tidak akan dapat memenuhi kebutuhan barang publik secara efisien meskipun mereka mencoba untuk menyediakannya. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran untuk memproduksi barang publik. Barang publik dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan pemerintah berperan dalam penyediaannya. Biaya produksi atau pengadaan barang publik biasanya dibiayai melalui pajak, berbeda dengan barang privat yang diproduksi dan dijual oleh organisasi atau perusahaan swasta.

Karakteristik Barang dan Jasa Publik

Ada dua karakteristik utama yang menjadi ciri khas barang publik (Prasetya, 2012):

a) Barang Publik Bersifat Non-Rival

Barang publik memiliki sifat non-rival dalam konsumsinya, artinya jumlah barang publik tertentu bisa dibagi oleh banyak konsumen tanpa mengurangi jumlah konsumsi yang tersedia bagi konsumen lainnya. Sebagai contoh, siaran televisi dan radio adalah barang non-kompetitif dalam hal konsumsi. Banyak konsumen dapat menikmati program yang sama tanpa saling mengurangi pengalaman satu sama lain. Sebagai contoh lain, manfaat dari jasa pertahanan juga tidak bersaing. Bahkan ketika populasi suatu negara meningkat, tidak ada warga negara yang akan mengalami penurunan jumlah layanan pertahanan yang diterima, karena pertahanan dan keamanan diberikan secara merata kepada seluruh penduduk. Barang publik murni memiliki karakteristik utama non-rivalitas, yang berarti konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengonsumsinya.

b) Barang Publik Bersifat Non-Eksklusif

Barang publik juga bersifat non-eksklusif, artinya tidak ada individu yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaat barang publik tersebut. Meskipun ada individu yang mungkin tidak ingin orang lain menikmati barang publik, mereka tidak bisa mencegahnya. Dalam banyak kasus, sulit atau tidak mungkin menetapkan harga yang seragam untuk barang publik. Properti ini disebut non-eksklusivitas. Misalnya, akan sangat mahal dan tidak praktis untuk mengecualikan orang-orang yang menolak membayar untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas udara. Ketika barang publik disediakan untuk kepentingan orang banyak, tidak ada satu orang pun yang bisa dikecualikan dari menikmatinya. Sebagai contoh, peningkatan kualitas udara memberikan manfaat bagi semua orang, tanpa memandang kontribusi mereka terhadap biaya tersebut.

Pendidikan sebagai Barang dan Jasa Publik

Pendidikan adalah contoh dari barang publik yang konsumsinya tidak membebankan biaya pada masyarakat, dan tidak ada orang yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaatnya. Samuelson menambahkan bahwa barang publik adalah barang yang manfaatnya tersebar secara merata ke seluruh masyarakat, baik digunakan atau tidak. Barang publik memiliki karakteristik khusus yaitu ketersediaannya bisa ditingkatkan melalui intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah. Contoh ekstrim dari kepentingan publik adalah pertahanan negara. Setiap orang, secara tidak langsung, menggunakan layanan ini, dan konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi konsumsi oleh orang lain.

Dua syarat utama yang berlaku untuk barang publik adalah non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Non-rivalitas berarti bahwa mengonsumsi suatu barang tidak membuat barang tersebut kurang tersedia bagi orang lain. Non-eksklusivitas berarti tidak ada satu pun yang bisa dikecualikan dari penggunaan barang tersebut. Barang publik belum tentu bersifat publik jika untuk mendapatkannya seseorang perlu berusaha dan mengeluarkan biaya. Barang publik harus tersedia bagi masyarakat tanpa persaingan. Menurut Grace (H. McLaughlin, Bab 12), pendidikan mengklaim statusnya sebagai barang publik selama pendidikan menciptakan kondisi dasar yang memungkinkan terjadinya demokrasi. Barang publik pada dasarnya meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar layanan tersebut, dan meningkatkan kapasitas moral, intelektual, kreatif, ekonomi, dan politik mereka. Ini adalah layanan publik yang diinginkan yang memfasilitasi perolehan tersebut.

Peran Negara dalam Penyediaan Barang Publik

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan barang publik. Karena sifat non-rivalitas dan non-eksklusivitas, barang publik tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor swasta cenderung mencari keuntungan, yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan untuk menyediakan barang secara gratis atau dengan biaya minimal. Oleh karena itu, negara harus campur tangan untuk memastikan bahwa barang publik tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Barang publik biasanya dibiayai melalui pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pendapatan pajak digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang publik sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Model pembiayaan ini berbeda dengan barang privat yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan swasta dengan harga tertentu. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai barang-barang publik seperti pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur.

Penyediaan barang publik oleh negara dianggap lebih efisien karena negara tidak berorientasi pada keuntungan seperti sektor swasta. Negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang paling efektif dan adil. Oleh karena itu, negara bisa menyediakan barang-barang publik tanpa harus membebani masyarakat dengan biaya tambahan. Meskipun negara bertanggung jawab atas penyediaan barang publik, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah pendanaan. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang publik. Selain itu, pemerintah juga harus mengelola barang-barang publik dengan cara yang transparan dan akuntabel untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

Barang publik adalah barang yang memberikan manfaat kepada banyak orang tanpa memerlukan pembayaran dari pengguna. Barang publik memiliki dua karakteristik utama: non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Pendidikan adalah contoh barang publik karena memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan tidak mengecualikan siapapun dari menikmati manfaatnya. Negara memiliki peran penting dalam penyediaan barang publik, dan pembiayaannya biasanya dilakukan melalui pajak. Penyediaan barang publik oleh negara lebih efisien karena negara tidak berorientasi pada keuntungan. Meskipun demikian, penyediaan barang publik menghadapi tantangan pendanaan dan pengelolaan yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Barang publik memberikan manfaat luas yang tidak dibatasi oleh konsumsi individual. Karakteristik ini menuntut peran aktif negara dalam penyediaannya, mengingat sektor swasta tidak dapat menyediakannya secara efisien karena orientasi profit. Pajak menjadi instrumen utama dalam membiayai barang publik, memastikan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, bisa mendapatkan manfaatnya. Hal ini berbeda dengan barang privat yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan swasta dengan harga tertentu.

Peran negara sangat krusial. Pendidikan sebagai barang publik memungkinkan setiap warga negara untuk memperoleh manfaat tanpa perlu membayar langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Dalam praktek, pendidikan membantu menciptakan dasar untuk demokrasi dengan meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas moral, intelektual, serta ekonomi masyarakat. Pendidikan yang disediakan oleh negara harus diakses secara merata dan adil, tanpa ada yang dikecualikan.

Penyediaan barang publik juga menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan pengelolaan. Negara harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan publik. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. Pemerintah harus memastikan bahwa barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Selain pendidikan, contoh lain dari barang publik adalah layanan kesehatan, infrastruktur jalan, dan pertahanan negara. Layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah memungkinkan akses bagi seluruh masyarakat tanpa biaya tambahan. Infrastruktur jalan, yang dibangun dan dipelihara oleh negara, juga memungkinkan akses transportasi yang mudah dan gratis bagi semua pengguna. Pertahanan negara memberikan keamanan dan perlindungan yang merata kepada seluruh warga negara, tanpa memandang kontribusi individu terhadap biaya pertahanan tersebut. Peran negara dalam penyediaan barang publik sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Negara

harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa publik secara efisien, adil, dan merata. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang kemampuan ekonomi, dapat menikmati manfaat dari barang publik. Pemerintah harus bekerja untuk mengatasi tantangan pendanaan dan pengelolaan untuk memastikan bahwa barang publik tetap dapat diakses oleh semua orang.

SIMPULAN

Pendidikan dapat dikategorikan sebagai barang publik atau barang privat. Sebagai barang publik, pendidikan adalah kebutuhan masyarakat yang penting tetapi tidak ada individu yang bersedia memproduksinya tanpa adanya insentif. Pendidikan sebagai barang publik menjadi dasar bagi produksi barang publik lainnya karena penyediaannya bersifat gratis, universal, dan memiliki akses yang setara. Hal ini memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, yang merupakan landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang demokratis dan berfungsi secara efektif. Pendidikan meningkatkan kecerdasan serta partisipasi warga negara, sehingga merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektual dan kreatif seluruh warga negara. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh terikat pada kelas, ras, jenis kelamin, atau kemampuan membayar siswa.

Di sisi lain, pendidikan juga dapat digolongkan sebagai barang privat atau "common good" jika penyelenggaraannya tidak hanya dipengaruhi oleh motif agama dan kebangsaan, tetapi juga oleh pertimbangan bisnis. Dalam konteks ini, persaingan untuk memperoleh pendidikan yang memadai menjadi penting. Namun, persaingan ini seharusnya didasarkan pada kecerdasan dan intelektualitas, bukan pada kemampuan finansial atau status sosial. Oleh karena itu, penggunaan terminologi yang tepat sangatlah penting.

Banyak orang masih berpendapat bahwa pendidikan adalah baik barang publik maupun barang privat. Pendidikan sebagai barang publik adalah dasar bagi terciptanya barang publik lainnya karena penyelenggaraannya gratis, universal, dan setara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat demokratis dapat berfungsi dengan baik dan untuk meningkatkan kecerdasan serta partisipasi warga negara. Pendidikan harus dilihat sebagai pelayanan publik

yang bertujuan meningkatkan potensi intelektual dan kreatif semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan kelas, ras, jenis kelamin, atau kemampuan finansial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang termuat dalam PP 48 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 2 tentang Pembiayaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa prinsip keadilan harus menjamin bahwa semua peserta didik memiliki akses terhadap layanan pendidikan tanpa memandang asal suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan, atau status sosial ekonomi.

menciptakan masyarakat yang demokratis dan partisipatif, pendidikan harus diselenggarakan sebagai barang publik. Ini berarti penyediaan pendidikan harus bebas biaya, universal, dan memiliki akses yang setara bagi semua individu. Hal ini penting karena pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan individu tetapi juga untuk membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Pendidikan yang setara dan bebas dari diskriminasi akan mendorong inklusi sosial dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Sebagai barang publik, pendidikan menjadi fondasi penting bagi penyediaan barang publik lainnya. Penyediaannya oleh pemerintah memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial bagi individu untuk mengakses pendidikan, sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat dari sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Namun, ketika pendidikan diperlakukan sebagai barang privat, akses dan kualitas pendidikan dapat menjadi tidak merata, bergantung pada kemampuan individu atau keluarga untuk membayar biaya pendidikan. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dan memperlebar kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan pendidikan sebagai barang publik yang bebas biaya, universal, dan setara. Ini akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Pendidikan sebagai barang publik tidak hanya meningkatkan potensi intelektual dan kreatif warga negara, tetapi juga membangun dasar bagi partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan sebagai barang publik harus dipertahankan untuk memastikan bahwa setiap individu

memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan pendidikan, tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi pada kemajuan bersama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, bimbingan, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan jurnal tentang “Barang dan Jasa Publik” ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna karena penulis masih dalam proses belajar. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan jurnal ini dan harap dimaklumi. Semoga isi jurnal ini bermanfaat bagi kita semua.

REFERENSI

- Andhika, R. L. (2017). *Meta Theory: Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Ilmu Administrasi Universitas Padjajaran.
- Anggito, Albi & Seyiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Al-arif, R. M. (2018). *Pendidikan Sebagai Barang Ekonomi*. Pustaka UT. Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahan. Bogor:
- Kemenag RI. H.McLaughlin, D. B. (Chapter 12, 3 15). *Education and the Market Place*. Education is Public Good, 4.
- Hidayatullah, S. (15 Maret 2022 Pukul 13.23). *Pendidikan: Barang Publik?* Jakarta: kompasiana.
- Irianto, A. (2017). *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu negara*. Jakarta: Kencana Khairi, Khalilul. *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*. Modul 1. repository.ut.ac.id.
- Maulana, A. & Indriati, F. (2022). *Kebijakan Privatisasi Pendidikan Sebagai Dampak Dari Globalisasi*. *Jurnal MODERAT*, Volume 8, Nomor 1
- Musfah, Jejen. (2016). *Tips Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Priatna, T. (2004). *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- S, T. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Siregar, D. R. S. Ratnaningsih, S. & Nurochim. (2022). *Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia*. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. Vol. 3. No. 1.
- Undang-Undang. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Yusuf, A. (2014). *Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.